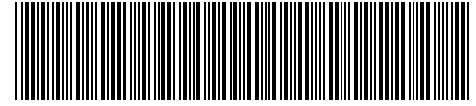




**SURAT PENGESAHAN DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2019
NOMOR : SP DIPA- 013.09.2.408778/2019**



DS:8443-1829-6960-4033

Revisi ke 03

Tanggal : 30 April 2019

A. Dasar Hukum:

- 1.UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.
- 2.UU No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.
- 3.UU No. 12 Tahun 2018 tentang APBN TA 2019

B. Dengan ini disahkan Alokasi Anggaran Untuk:

- | | | |
|-------------------------------|------------|---|
| 1. Kementerian Negara/Lembaga | : (013) | KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI |
| 2. Unit Organisasi | : (09) | DITJEN HAK ASASI MANUSIA |
| 3. Provinsi | : (19) | SULAWESI SELATAN |
| 4. Kode>Nama Satker | : (408778) | KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM UJUNG PANDANG |
| Sebesar | : Rp. | 281.828.000 (DUA RATUS DELAPAN PULUH SATU JUTA DELAPAN RATUS DUA PULUH DELAPAN RIBU RUPIAH) |

Untuk kegiatan-kegiatan sebagai berikut :

Kode dan Nama Fungsi dan Sub Fungsi :

03 KETERTIBAN DAN KEAMANAN
03.03 PEMBINAAN HUKUM

Kode dan Nama Program dan Kegiatan :

013.09.11 Program Pemajuan HAM
013.09.11.5255 Penyelenggaraan Pemajuan Ham di Wilayah

Jumlah Uang

Rp.	281.828.000
Rp.	281.828.000

C. Sumber Dana Berasal Dari :

- | | | | | | |
|-------------------------------|-----|-------------|--------------------------------|-----|---|
| 1. Rupiah Murni | Rp. | 281.828.000 | 4. Pinjaman/Hibah Dalam Negeri | Rp. | 0 |
| 2. PNB | | | - Pinjaman Dalam Negeri | Rp. | 0 |
| PNBP TA Berjalan | Rp. | 0 | - Hibah Dalam Negeri | Rp. | 0 |
| | | | 5. Hibah Langsung | Rp. | 0 |
| 3. Pinjaman/Hibah Luar Negeri | Rp. | 0 | - Hibah Luar Negeri Langsung | Rp. | 0 |
| - Pinjaman Luar Negeri | Rp. | 0 | - Hibah Dalam Negeri Langsung | Rp. | 0 |
| - Hibah Luar Negeri | Rp. | 0 | 6. SBSN PBS | Rp. | 0 |

D. Pencairan dana dilakukan melalui :

- | | | |
|---------------------|-----------|-------------|
| 1. KPPN MAKASSAR II | (136) Rp. | 281.828.000 |
|---------------------|-----------|-------------|

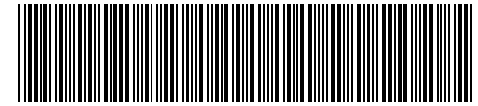
E. Pernyataan Syarat dan Ketentuan (Disclaimer)

1. DIPA Petikan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari DIPA Induk (Nama Program, Unit Organisasi dan Kementerian Negara/Lembaga).
2. DIPA Petikan ini dicetak secara otomatis melalui sistem yang dilengkapi dengan kode pengaman berupa digital stamp sebagai pengganti tanda tangan pengesahan (otentifikasi).
3. DIPA Petikan berfungsi sebagai dasar pelaksanaan kegiatan satker dan pencairan dana/pengesahan bagi Bendahara Umum Negara/Kuasa Bendahara Umum Negara.
4. Rencana Penarikan Dana dan Perkiraan Penerimaan yang tercantum dalam Halaman III DIPA diisi sesuai dengan rencana pelaksanaan kegiatan.
5. Tanggung jawab terhadap penggunaan anggaran yang tertuang dalam DIPA Petikan sepenuhnya berada pada Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran.
6. Dalam hal terdapat perbedaan data antara DIPA Petikan dengan database RKA-K/L-DIPA Kementerian Keuangan maka yang berlaku adalah data yang terdapat di dalam database RKA-K/L-DIPA Kementerian Keuangan (berdasarkan bukti-bukti yang ada).
7. DIPA Petikan berlaku sejak tanggal 1 Januari 2019 sampai dengan 31 Desember 2019.

Jakarta, 05 Desember 2018
A.N MENTERI KEUANGAN
DIREKTUR JENDERAL ANGGARAN

ttd.
ASKOLANI
NIP. 196606111992021001

**DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2019
NOMOR : DIPA- 013.09.2.408778/2019
IA. INFORMASI KINERJA**



DS:8443-1829-6960-4033

Kementerian Negara/Lembaga : (013) KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI
Unit Organisasi : (09) DITJEN HAK ASASI MANUSIA
Provinsi : (19) SULAWESI SELATAN
Kode>Nama Satker : (408778) KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM UJUNG PANDANG

Kuasa Pengguna Anggaran : Drs. Priyadi, Bc.IP., M.Si.
Bendahara Pengeluaran : SAFRI
Pejabat Penanda Tangan SPM : Ir. H. ABD. RAHMAN L. M.H

Halaman : IA.1

1 Fungsi	03	KETERTIBAN DAN KEAMANAN			281.828.000
Sub Fungsi	03.03	PEMBINAAN HUKUM			281.828.000
2 Program	013.09.11	Program Pemajuan HAM			281.828.000
Sasaran Program	01	Meningkatnya kebijakan pembangunan yang berperspektif HAM			
Indikator Kinerja Program	01	Persentase Kementerian/Lembaga yang telah melaksanakan program aksi HAM	40	Persen	
	02	Persentase Pemerintah Daerah yang telah melaksanakan program aksi HAM	20	Persen	
	03	Jumlah kabupaten/kota peduli HAM	50	Kab/Kota	
	04	Jumlah Rekomendasi Penanganan Dugaan Pelanggaran HAM yang ditindaklanjuti oleh Instansi Terkait	50	Rekomendasi	
Output Program	01	kebijakan pembangunan yang berperspektif HAM			
Indikator Output Program	01	Jumlah Kebijakan pembangunan yang berperspektif HAM	1	kebijakan	
Kegiatan	5255	Penyelenggaraan Pemajuan Ham di Wilayah			281.828.000
Sasaran Kegiatan	01	Jumlah pemerintah daerah yang melaksanakan program aksi HAM			
	02	Jumlah Layanan Hak Asasi Manusia Di Wilayah			
Indikator Kinerja Kegiatan	01	Jumlah pemerintah daerah yang melaksanakan program aksi HAM			
	02	jumlah kab/kota peduli HAM			
	01	Jumlah layanan HAM di wilayah			
Output Kegiatan	5255.001	Layanan Hak Asasi Manusia Di Wilayah	1 Layanan		167.358.000
Indikator Output Kegiatan	01	Jumlah Layanan Hak Asasi Manusia di wilayah	1	Layanan	
Output Kegiatan	5255.002	Pembangunan Hak Asasi Manusia Di Wilayah	4 Pemda		114.470.000
Indikator Output Kegiatan	01	Jumlah Pemerintah Daerah yang melaksanakan aksi HAM	1	Pemerintah Daerah	
	02	Jumlah Kab/Kota Peduli HAM	1	Kab/Kota	

Jakarta, 05 Desember 2018
Direktur Jenderal Hak Asasi Manusia

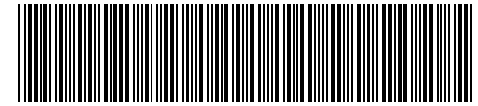
ttd.
Dr. MUALIMIN ABDI, SH., MH
NIP 196211211982031001

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN

TAHUN ANGGARAN 2019

NOMOR : DIPA- 013.09.2.408778/2019

I B. SUMBER DANA



DS:8443-1829-6960-4033

Kementerian Negara/Lembaga : (013) KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI
 Unit Organisasi : (09) DITJEN HAK ASASI MANUSIA
 Provinsi : (19) SULAWESI SELATAN
 Kode>Nama Satker : (408778) KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM UJUNG PANDANG

					Pagu		Ekuivalen Rupiah	
1. Anggaran Tahun 2019	Rp.	281.828.000	Ket :	a. Pinjaman Luar Negeri (1) Valuta Asing	US\$	0	Rp.	0
1. Rupiah Murni	Rp.	281.828.000		(2) RPLN	US\$	0	Rp.	0
2. PNPB	Rp.	0		b. Hibah Luar Negeri (1) Valuta Asing	US\$	0	Rp.	0
3. Pinjaman/Hibah Luar Negeri	Rp.	0		(2) RHLN	US\$	0	Rp.	0
4. Pinjaman/Hibah Dalam Negeri	Rp.	0		c. Pinjaman Dalam Negeri	IDR	0		
5. Hibah Langsung	Rp.	0		d. Hibah Dalam Negeri	IDR	0		
6. SBSN PBS	Rp.	0		e. Hibah Luar Negeri Langsung	IDR	0		
2. Rincian Pinjaman / Hibah :				f. Hibah Dalam Negeri Langsung	IDR	0		

(dalam ribuan rupiah)

No.	SUMBER PINJAMAN DAN HIBAH No. NPP/H per Tahun No. Register		PAGU TAHUN INI		RINCIAN DANA BERDASARKAN CARA PENARIKAN		DANA PENDAMPING		
	Kode	Uraian	Kode	Dana	Kode	Dana	Rp. Pdp	Rp.LN	Rp.Loc.Cost
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

**DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2019
NOMOR : DIPA- 013.09.2.408778/2019
II. RINCIAN PENGELUARAN**



DS:8443-1829-6960-4033

Kementerian Negara/Lembaga : (013) KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI
Unit Organisasi : (09) DITJEN HAK ASASI MANUSIA
Provinsi : (19) SULAWESI SELATAN
Kode>Nama Satker : (408778) KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM UJUNG PANDANG
Kewenangan : (KD)

Halaman : II. 1
(dalam ribuan rupiah)

KODE	URAIAN SATKER/PROGRAM/KEGIATAN/OUTPUT/SUMBER DANA	BELANJA						LOKASI/ KPPN	CARA PENARIKAN/ REGISTER
		PEGAWAI [51]	BARANG [52]	MODAL [53]	BANTUAN SOSIAL [57]	LAIN-LAIN [58]	JUMLAH SELURUH 8		
1	2	3	4	5	6	7	9	10	
408778	KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM UJUNG PANDANG	-	281.828	-	-	-	281.828		
013.09.11	Program Pemajuan HAM	-	281.828	-	-	-	281.828		
5255	Penyelenggaraan Pemajuan Ham di Wilayah	-	281.828	-	-	-	281.828		
5255.001	Layanan Hak Asasi Manusia Di Wilayah	-	167.358	-	-	-	167.358	19 . 51	
01	RM	-	167.358	-	-	-	167.358	136	
5255.002	Pembangunan Hak Asasi Manusia Di Wilayah	-	114.470	-	-	-	114.470	19 . 51	
01	RM	-	114.470	-	-	-	114.470	136	
JUMLAH		-	281.828	-	-	-	281.828		

Jakarta, 05 Desember 2018
Direktur Jenderal Hak Asasi Manusia

ttd.
Dr. MUALIMIN ABDI, SH., MH
NIP 196211211982031001

**DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2019
NOMOR : DIPA- 013.09.2.408778/2019
III. RENCANA PENARIKAN DANA DAN PERKIRAAN PENERIMAAN**



DS:8443-1829-6960-4033

Kementerian Negara/Lembaga : (013) KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI
Unit Organisasi : (09) DITJEN HAK ASASI MANUSIA
Provinsi : (19) SULAWESI SELATAN
Kode>Nama Satker : (408778) KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM UJUNG PANDANG

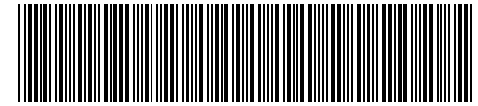
Halaman : III. 1
(dalam ribuan rupiah)

NO	KODE	URAIAN SATKER	RENCANA PENARIKAN												JUMLAH SELURUH
			JANUARI	FEBRUARI	MARET	APRIL	MEI	JUNI	JULI	AGUSTUS	SEPTEMBER	OKTOBER	NOVEMBER	DESEMBER	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1.	408778	KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM UJUNG PANDANG													
		RENCANA PENARIKAN DANA	0	0	20.558	37.000	41.097	29.355	55.580	15.180	17.846	54.860	6.802	3.550	281.828
		52 BELANJA BARANG	0	0	20.558	37.000	41.097	29.355	55.580	15.180	17.846	54.860	6.802	3.550	281.828
013.09.11.5255		Penyelenggaraan Pemajuan Ham di Wilayah	0	0	20.558	37.000	41.097	29.355	55.580	15.180	17.846	54.860	6.802	3.550	281.828
		52 BELANJA BARANG DAN BARANG	0	0	20.558	37.000	41.097	29.355	55.580	15.180	17.846	54.860	6.802	3.550	281.828

Jakarta, 05 Desember 2018
Direktur Jenderal Hak Asasi Manusia

ttd.
Dr. MUALIMIN ABDI, SH., MH
NIP 196211211982031001

**DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2019
NOMOR : DIPA- 013.09.2.408778/2019
IV A. B L O K I R**



DS:8443-1829-6960-4033

Kementerian Negara/Lembaga : [013] KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI
Unit Organisasi : [09] DITJEN HAK ASASI MANUSIA
Provinsi : [19] SULAWESI SELATAN
Kode dan Nama Satker : [408778] KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM UJUNG PANDANG

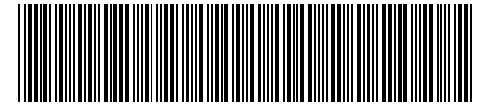
Halaman : IV.A. 1
(dalam ribuan rupiah)

KODE	URAIAN	KODE	URAIAN

Jakarta, 05 Desember 2018
Direktur Jenderal Hak Asasi Manusia

ttd.
Dr. MUALIMIN ABDI, SH., MH
NIP 196211211982031001

**DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2019
NOMOR : DIPA- 013.09.2.408778/2019
IV B. C A T A T A N**



DS:8443-1829-6960-4033

Kementerian Negara/Lembaga : [013] KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI
Unit Organisasi : [09] DITJEN HAK ASASI MANUSIA
Provinsi : [19] SULAWESI SELATAN
Kode dan Nama Satker : [408778] KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM UJUNG PANDANG

Halaman : IV.B. 1
(dalam ribuan rupiah)

KODE	URAIAN	KODE	URAIAN

Jakarta, 05 Desember 2018
Direktur Jenderal Hak Asasi Manusia

ttd.
Dr. MUALIMIN ABDI, SH., MH
NIP 196211211982031001